KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Targetkan Penyelesaian Empat RUU Prioritas: Legislasi 2021
Tanggal : Selasa, 10 November 2020
Surat Kabar : Kontan
Halaman : 14

LEGISLASI 2021

DPR Targetkan Penyelesaian Empat RUU Prioritas

JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai menyusun Rancangan Undang -Undang (RUU) program legislasi nasional (Prolegnas) 2021.

Namun sebelum menyusun yang baru DPR akan menyelesaikan empat RUU di masa sidang II 2020-2021 Keempat RUU ini adalah, RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Daerah Kepulauan, RUU Penanggulangan Bencana, dan RUU Pengesahan Perjanjian Dagang dengan Uni Eropa.

"Keempat RUU ini akan diselesaikan karena sudah masuk tahap pembicaraan tingkat satu," kata Ketua DPR RI Puan Maharani saat pidato pembukaan rapat pari purna DPR dengan agenda pembukaan masa sidang II 2020-2021, Senin (9/11)

Ketua DPR menyebut prioritas pembahasan RUU ini harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu ia juga meminta agar penetapan RUU prioritas juga mengacu pada hasil evaluasi pembahasan Rancangan Undang-Undang yang dilakukan pada 2020 ini.

Pada kesempatan itu Puan juga meminta target pembahasan UU tahun depan juga harus lebih realistis mengingat masa masih dalam situasi pandemi korona Covid-19.

Seperti kita tahu pembahasan RUU di DPR yang menjadi sorotan adalah saat membahas RUU Cipta Kerja yang dilakukan dalam waktu cepat meskipun membedah sebanyak 79 Undang-Undang di satu RUU. Hasilnya, UU Cipta Kerja menjadi kontroversi karena banyak terjadi kesalahan-kesalahan.

Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Fomappi) I Made Leo Wiratma menyoroti evaluasi fungsi legislasi DPR RI. Menurut Leo, 2020 DPR hanya mampu menyelesaikan dua RUU, yakni RUU Bea Meterai dan RUU Cipta Kerja. Kini DPR masih menyisakan 35 RUU prioritas. 24 RUU diantaranya yang belum digarap sama sehingga sulit untuk bisa selesai tahun ini.

Vendy Y.S., Ratih Waseso.

Empat RUU Prioritas Selesai Tahun 2020

1. RUU Tentang Perlindungan Data Pribadi,
2. RUU Tentang Daerah Kepulauan,
3. RUU Tentang Perubahan atas UU Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana,
4. RUU Tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dengan Negara Negara EFTA (European Free Trade Association).

Sumber: DPR RI dan Riset KONTAN